

PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASH-SHODDIQ DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

¹Eliza Rahmah Prahestiwi, ²Ihat Hatimah, ³Asep Saepudin

^{1,2,3} IKIP Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

¹eprahestiwi08@gmail.com, ²ihat.hatimah@upi.edu, ³aspudin@upi.edu

Received: December, 2021; Accepted: Januari, 2022

Abstract

This study aims to describe and analyze the management of PKBM Ash-Shoddiq, Pagerwangi Village, Lembang District, West Bandung Regency. This research was conducted using a descriptive research method with a qualitative approach. The qualitative approach itself focuses on elements that contain subjective, definitive meanings, as well as descriptions of a research based on the researcher's schema or frame of mind. Sources of data from this study were three sources consisting of Information Sources, namely the chairman and owner of PKBM, namely Dadang Lutfiansyah, M.Pd. as well as two people around the PKBM who can provide data. To strengthen field data acquisition, researchers used observation, interview, and documentation techniques online and went directly to the research object managers, as well as the social media of the objects in April 2021. And used purposive sampling technique. The results showed the data obtained regarding: PKBM management includes managerial stages including the steps: Planning (Planning), Organizing (Organizing), Implementation (Motivating), Coaching (Conforming), Assessment (Evaluating), Development (Developing). Programs implemented by PKBM include Kecimpring Entrepreneurship Life Skills, Functional Literacy, Equality, PAUD, TBM, Youth and Sports Development, Women's Empowerment, Talim Council, TPA, and Tahfidz House. PKBM has not yet carried out accreditation, because it has only graduated 3 batches of equality education programs. The problems in PKBM are the lack of institutional facilities and infrastructure (lack of classrooms, teaching rooms and education personnel, narrow land area), this is due to a lack of funding, not comparable to the location of the PKBM institution which is in the middle of a busy tourist spot. visited by local and outside tourists.

Keywords: Management & Learning centers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan PKBM Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri berfokus pada unsur-unsur yang mengandung makna subjektif, definitif, serta deskripsi suatu penelitian berdasarkan skema atau kerangka pikir peneliti. Sumber data dari penelitian ini adalah tiga orang narasumber yang terdiri dari Sumber Informasi, yaitu ketua sekaligus pemilik PKBM yaitu Dadang Lutfiansyah, M.Pd. serta dua orang masyarakat sekitar PKBM yang dapat memberikan data. Sebagai penguat perolehan data lapangan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara online dan langsung terjun ke lapangan terhadap pengelola objek telitian, serta media sosial para objek pada bulan April 2021. Serta menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan data yang diperoleh mengenai: Pengelolaan PKBM meliputi tahapan-tahapan manajerial meliputi langkah: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Motivating), Pembinaan (Conforming), Penilaian (Evaluating), Pengembangan (Developing). Program yang dilaksanakan oleh PKBM antara lain Life Skill Kewirausahaan Kecimpring, Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan, PAUD, TBM, Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Majelis Talim, TPA, dan Rumah Tahfidz. PKBM belum melakukan akreditasi, dikarenakan baru meluluskan 3 angkatan program pendidikan kesetaraan. Permasalahan yang terdapat di PKBM yaitu kurangnya

sarana dan prasarana lembaga (kurangnya ruang kelas, ruang pendidik dan tenaga kependidikan, luas tanah yang sempit) hal tersebut dikarenakan kurangnya pembiayaan, tidak sebanding dengan letak lokasi lembaga PKBM yang berada di tengah-tengah tempat wisata punclut ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar Bandung.

Kata Kunci : Pengelolaan & Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

How to Cite: Prahestiwi, E.R., Hatimah, I. & Saepudin, A. (2022). Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(1), 33-42.

PENDAHULUAN

Adapun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan proses pendidikan diwujudkan dengan mendirikan satuan pendidikan nonformal, dan bekerjasama dengan pemerintah melalui satuan kerja pendidikan nonformal dan informal. Kegiatan yang merupakan bagian dalam pendidikan nonformal diantaranya adalah kegiatan keaksaraan. Salah satu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kegiatan keaksaraan tersebut adalah PKBM/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Siti Almaidah; 2017:163).

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dalam 3 jalur sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11, 12, 13 menyatakan bahwa:

- (11). Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (12). Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- (13). Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Menurut data dari PAUD DIKMAS kemendikbud Tahun 2019/2020 Jumlah Satuan Pendidikan PKBM di Kab. Bandung Barat mempunyai PKBM sejumlah 47 lembaga yang mempunyai program PNF. PKBM dengan berbagai program PNF dan kewirausahaan sosial memberikan daya dukung bagi pelaksanaan PKBM dan perkembangannya. Namun demikian 47 PKBM di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat on-off. Hal ini tergantung oleh dana dari pemerintah. Melihat kondisi dan kelembagaan PKBM, memberikan peluang untuk memberikan pendampingan manajerial kepada PKBM agar mandiri dan dapat memberikan layanan pendidikan nonformal dengan baik. Pendampingan pengelolaan (manajemen) program berbasis kewirausahaan dilakukan untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan sebagai upaya menciptakan kemandirian lembaga PKBM.

Permasalahan yang sangat penting terutama pada organisasi PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan, sebagaimana dijelaskan Zainudin (2002) bahwa pengelolaan PKBM mempunyai perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Seiring pesatnya jumlah PKBM, namun tidak diikuti meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani dan belum mengukir prestasi. Uum Suminar (2007:82) mendeskripsikan pertumbuhan PKBM masih bersifat kuantitas, belum dibarengi dengan kualitas. Rendahnya mutu pengelolaan PKBM diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: mutu input, mutu proses dan mutu output. Hasil penelitian Bitasari (2006) dan Ermy (2008) di Semarang menunjukkan pengelolaan pembelajaran program pendidikan di PKBM telah menerapkan pendekatan andragogi cukup baik, namun tujuan PKBM yang berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi (pekerjaan dan penghasilan) belum tercapai dengan baik. Bertolak dari kondisi ini, diperlukan upaya-upaya kearah pemberdayaan PKBM

khususnya dalam pengelolaan program pendidikan kesetaraan yang berbasis *life skills* dan entrepreneurship (Hardjono, Tri Joko Raharjo, & Tri Suminar; 2019: 2).

Seperti yang terjadi di sebagian besar PKBM yang ada di Indonesia, PKBM memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul pun merupakan permasalahan mendasar dari masyarakat berdiri. Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, kurangnya motivasi belajar warga belajar, kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk menuntaskan jenjang pendidikan, sulitnya mencari waktu yang pas antara tutor dan warga belajar, terbatasnya ketersediaan tutor yang kompeten, sulitnya mengurus ijin operasional, jauhnya jarak para warga belajar ke tempat belajar, kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan, sulitnya mencari mitra kerja untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas PKBM, merupakan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada PKBM. Permasalahan-permasalahan yang timbul di PKBM, merupakan refleksi nyata kebutuhan keterlibatan semua warga masyarakat serta seluruh sumber daya manusia yang peduli terhadap peningkatan kualitas PKBM. Kualitas setiap PKBM berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan kondisi nyata yang tak bisa dihindarkan. Salah satu faktor penentu kualitas PKBM adalah kualitas pengelola suatu PKBM, selain tutor, yang merupakan agen of changes dari sebuah penyelenggaraan PKBM. Pengelola PKBM akan sangat terkait dengan kualitas layanan yang mereka berikan kepada warga belajar dan tutor, serta penyediaan fasilitas pendukung program-program yang ada di PKBM. Kualitas layanan PKBM akan sangat menentukan keberhasilan program PKBM. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan Kompetensi memadai, akan memiliki peran penting dalam pengelolaan PKBM serta peningkatan kualitas layanan ideal. Hal ini dipegang oleh pengelola PKBM (Emma Himayaturrahmah; 2017:101-102).

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter, baik biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua. Harsono (2008: 9) biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Setiap pengeluaran yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut dengan pemborosan atau pengeluaran yang seharusnya dapat dihindari atau dicegah. Lembaga pendidikan dikatakan boros jika dana operasional, dana pengembangan dan dana yang dikeluarkan oleh lembaga itu melebihi dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan pada unit kerjanya. Pengeluaran dana sekolah yang melebihi dana yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan berarti lembaga pendidikan itu bersifat boros (Hardi Siswoyo, dkk.; 2012:3).

METODE PENELITIAN

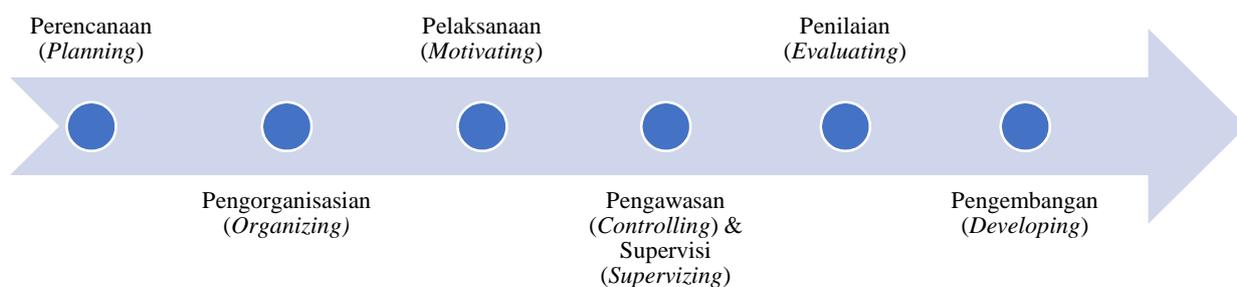
Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena analisis data diuraikan secara verbal yang menggambarkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pengelolaan PKBM Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Menurut sugiyono (2016:9) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi; Sedangkan filsafat *postpositivisme* sendiri sering disebut sebagai paradigma

interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*)”.

Pendekatan kualitatif sendiri berfokus pada unsur-unsur yang mengandung makna subjektif, definitif, serta deskripsi suatu telitian berdasarkan skema atau kerangka fikir peneliti. Sumber data dari penelitian ini adalah tiga orang narasumber yang terdiri dari : Sumber Informasi, yaitu ketua sekaligus pemilik PKBM yaitu Dadang Lutfiansyah, M.Pd. serta dua orang masyarakat sekitar PKBM yang dapat memberikan data. Sebagai penguat perolehan data lapangan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara online dan langsung terjun ke lapangan terhadap pengelola objek telitian, serta media sosial para objek pada bulan April 2021.

Menurut Sugiyono (2017:124) mengatakan bahwa, “*Purposive Sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Identitas Lembaga

PKBM didirikan pada tanggal 02 Mei 2006 yang bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional yang merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Namun secara legalitas formal keberadaan PKBM disahkan dan dibuktikan dengan akte notaries Tri Soetrisno, SH yakni pada tanggal 19 April 2007. Secara filosofis arti dari PKBM Ash-Shoddiq yang berarti PKBM yang (Shoddiq berasal dari bahasa Arab yang artinya=benar) benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selarasa serta serasi dengan aturan pemerintah dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

PKBM terletak di Kp. Babakan Bandung RT 02/RW 10 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat jarak dari pusat ibukota □ 15 kilometer dengan waktu tempuh □ 45 menit. Wilayah PKBM berada di dataran tinggi dengan ketinggian 1.300 m di atas permukaan laut, curah hujan 188 mm, dan suhu rata-rata berkisar 20° C di kaki Gunung Payung, mempunyai udara sejuk dan segar yang dikelilingi oleh pemandangan yang indah dimana dari atas terlihat secara utuh pemandangan (view) Kota Bandung. Jumlah penduduk

seluruhnya adalah 8.526 orang, yang terdiri dari 4.162 orang perempuan, dan 4.364 orang laki-laki bermata pencaharian rata-rata sebagai buruh, petani, dan pedagang.

Potensi daerah kota Kecamatan Lembang memiliki keanekaragaman potensi alam yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya, dan itu semua membutuhkan sentuhan-sentuhan teknologi.

Dengan demikian, keberadaan PKBM sangat diperlukan sebagai pusat informasi, jaringan kemitraan dan ajang pengembangan potensi serta merupakan wujud konkrit pemberdayaan manusia dengan semboyan “Dari, Oleh, Untuk Masyarakat” dengan dilandasi tekad “Menuju Masyarakat Mandiri Melalui Optimalisasi Potensi dan Swadaya”. Era globalisasi dan makin berkembangnya teknologi informasi yang berpengaruh pada pola komunikasi, menjadikan PKBM sebagai media fasilitasi bagi masyarakat pedesaan untuk dapat memiliki keterampilan dan memanfaatkan sumber informasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memiliki peran yang urgen dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Minimnya sumber daya yang ada memacu PKBM untuk mengembangkan dan menyumbangkan karya yang sebesar-besarnya bagi kemajuan masyarakat dengan harapan hasil karya masyarakat tersebut dapat membangun kemandirian.

Legalitas Lembaga

Berdasarkan temuan lapangan terkait legalitas lembaga PKBM dapat diuraikan sebagai berikut: a. No. Ijin pendirian: 422/426846 Paudni/2017; b. NPSN: P9926439; c. Status: Swasta; d. Bentuk Pendidikan: PKBM; e. Status Kepemilikan: Yayasan; f. NILEM : 321 02 00021 00001; g. Akta Notaris : No. 4.- Tgl 07 April 2007; i. Penjabat : Drs. Tri Soetrisno, S.H.; j. Yayasan: Yayasan Ash-Shoddiq; k. SK Menhukham: AHU-0031771.AH.01.04.Tahun 2015; l. Notaris: Boy Budiman Iskandar, SH. M.Hum; m. No. : 39 Tanggal 16 Desember 2015; n. Nama Bank: Bank BRI Unit Lembang; s. No Rek. Lembaga: 0887-01-021796-53-9; t. Nama Pemilik: Dadang Yunus L, M.Pd.; u. NPWP: 02.617.306.2-421.000; o. Sumber Listrik: PLN; p. Daya Listrik: 900; q. Akses Internet: Telkomsel Flash.

Standar Mutu

Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: warga belajar yang mengikuti program pendidikan kecakapan hidup pada tahun 2016 sebanyak 9 orang, program keaksaraan tahun 2005 sebanyak 20 orang, program pembinaan kepemudaan dan olahraga bidang sepak bola, program life skill kewirausahaan kecimping sewilayah desa, PKBM tahun 2020/2021 sebanyak 86 peserta didik, serta belum mengajukan akreditasi lembaga.

Standar Isi berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: Kurikulum yang digunakan oleh PKBM mengacu kepada kurikulum pendidikan nasional yaitu kurikulum 2013, kalender pendidikan mengacu kepada kalender akademik yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan namun disesuaikan dengan kondisi lembaga yang dirumuskan pada awal semester bersama kepala sekolah, guru/tutor, komite dan disosialisasikan kepada orang tua siswa.

Standar Proses berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: pembuatan silabus/RPPM, RPP/RPPH dilakukan setiap awal semester atau sebelum mulai proses pembelajaran/pelatihan dilakukan, pelaksanaan pengawasan pembelajaran dilakukan setiap hari baik itu materi dan pembelajaran, presensi siswa, presensi pendidik, melakukan

rekap tugas kepada peserta didik, serta melakukan remedial dan pengayaan kepada peserta didik program kejar paket, life skill setelah melakukan latihan atau ujian.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut : berdasarkan data dari dapodik Kemendikbud jumlah pendidik sebanyak 7 orang dan tenaga kependidikan 1 orang pada tahun 2020/2021, sedangkan data dari pihak PKBM tahun 2016 jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 37 orang, pendidik dan tenaga kependidikan kualifikasi pendidikan terakhir mulai dari SMA hingga S2. Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: ketersediaan peralatan pembelajaran cukup lengkap dengan kondisi baik; bahan bacaan sebanyak 106 buah (buku pelajaran SMP & SMA, buku agama, modul paket B, dan modul evaluasi KF) dengan kondisi baik; penggunaan media pembelajaran antara lain youtube, facebook, Instagram, dan website; prasarana ruangan PKBM terdiri dari 2 ruang kelas, 1 ruang kantor, dan beberapa ruang kelas yang belum selesai pembangunan pada lantai atas; kepemilikan prasarana adalah milik Yayasan PKBM Ash-Shoddiq.

Standar Pengelolaan berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: pihak PKBM telah memberikan data kepada penulis berupa profil pimpinan/ketua, visi misi dan tujuan lembaga, kemitraan dengan (Ditbindikmas Kemendikbud, Dekonsentrasi Disdik Propinsi Jabar, Desa Pagerwangi, Laboratorium Penmas UPI, Forum PKBM Kabupaten Bandung Barat, Yayasan Pengembangan Masyarakat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga), prestasi yang pernah diraih dalam bentuk (Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), bidang keaksaraan tingkat kota dan nasional, bidang PAUD, Ibu-ibu Tani, dan liputan TVRI tentang Penyelenggaraan); pelaksanaan kegiatan yang pernah dilakukan (PKH Perempuan (2014), Rintisan PAUD (2012), Keaksaraan Fungsional (2007), Paket B (2014), Majelis Talim, Pemberdayaan Perempuan (2012), dan Kewirausahaan Pemuda (2015)); Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh PKBM melalui jadwal pengawasan yang sudah terjadwalkan, dan dengan adanya laporan hasil pengawasan.

Standar Pembiayaan berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: sumber dana berasal dari (BOP, swadaya masyarakat Bantuan dari pemerintah serta donator, dana pribadi dari ketua Yayasan); pemanfaatan dana digunakan untuk menggaji/insentif pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan dan pembelian sarana dan prasana PKBM, pelayanan peserta didik, pengembangan dalam pembinaan masyarakat.

Standar Penilaian berdasarkan hasil lapangan yang ada di lembaga PKBM sebagai berikut: evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali tapi terkadang pula bersifat fleksibel dan insidental. pada evaluasi pembelajaran di PKBM sama dengan yang dilaksanakan oleh pendidikan sekolah seperti diadakannya UTS, UAS dan UAN.

Implementasi Program

Perencanaan program PKBM mengungkapkan beberapa indikator dari berbagai tahapan perencanaan yang telah dilakukan oleh pengelola PKBM melalui pendekatan manajemen pendidikan nonformal, diantaranya: a. Adanya administrasi meliputi data-data calon warga belajar dan warga belajar, data kondisi pendidikan penduduk, data kondisi mata pencaharian penduduk, data penduduk yang tidak meneruskan ke pendidikan formal. b. Adanya dokumentasi kesepakatan dengan tokoh masyarakat setempat untuk pendirian PKBM. c. Adanya penetapan visi, misi dan tujuan PKBM (1. Visi: Terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas, agamis, terampil, mandiri, berbudi luhur, produktif yang pada gilirannya dapat

meningkatkan taraf hidup dan hidup harmonis, serta selalu mengembangkan potensi diri; 2. Misi: Mengembangkan serta memfasilitasi usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat secara dinamis sesuai dengan kebutuhan setempat, serta memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat (baik komunitas tersebut maupun masyarakat luas) dalam upaya mendukung penyelenggaraan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.). d. Adanya penyusunan proposal pendirian.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), kepengurusan PKBM menentukan pembagian kerja (*job desk*), tanggungjawab yang jelas perorang dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan kesepakatan bersama. Sehingga pengelola dituntut untuk mampu mengumpulkan dan mengalokasikan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia, kemudian mengkoordinasikan anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Struktur pengurus PKBM antara lain: a. Ketua: Dadang Yunus Lutfiansyah, M.Pd.; b. Sekretaris: Syahidin, S.Pd.; c. Bendahara: Neng Nurhayati, Amd.; d. Koordinator PAUD: Cucu Sukmana, M.Pd.; e. Koordinator Keaksaraan: Purnomo, M.Pd; f. Koordinator Kesetaraan: Drs. Ade Gunawan; g. Koordinator TBM: Hasbulloh Kurniawan, S.Pd.; h. Koordinator Pemuda dan Olahraga: Masdian Nurhadi, ST.; i. Koordinator Life Skills: Wahyudin; j. Koordinator Pemberdayaan Perempuan: Sri Gelar Rini, S.Pd.

Pada tahap pelaksanaan (*motivating*) pendekatan yang dilakukan oleh pengelola dapat dikatakan sudah cukup baik. Pengelola PKBM membagi 3 bidang antara lain: Bidang pendidikan pendekatannya berupa mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, serta memberikan motivasi warga belajar; Bidang informasi pengelola memberikan layanan informasi dalam rangka sosialisasi dan promosi PKBM; Bidang Kemitraan pengelolaan membuat proposal pengajuan dana bantuan baik itu berupa dana uang tunai maupun dana bentuk lainnya bertujuan dalam pengembangan program kegiatan PKBM. Pada tahap pembinaan (*conforming*) yang dilakukan oleh PKBM hanya pada tataran pembinaan secara eksternal maksudnya para tutor dan warga belajar cenderung akan mengikuti pembinaan bila adanya kegiatan pembinaan dari lembaga lain sebagai lembaga Pembina PKBM itu sendiri. Sehingga belum terlihat upaya pembinaan secara profesional yang dilakukan oleh pengelola sendiri. Akan tetapi ternyata pembinaan yang terus-menerus didapat dari upaya para tutor ketika berhadapan langsung dengan warga belajar disaat proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelola jarang atau bahkan tidak pernah memberikan pembinaan secara formal tetapi bila didukung dengan perhatian dan komunikasi yang efektif antara pengelola dan tutor maka dipercaya bahwa disana telah terjadi upaya pembinaan meskipun hanya bersifat nonformal.

Pada tahap penilaian (*evaluating*) yang dilakukan oleh PKBM dilaksanakan setiap 6 bulan sekali tapi terkadang pula bersifat fleksibel dan insidental. Pada evaluasi pembelajaran di PKBM sama dengan yang dilaksanakan oleh pendidikan sekolah seperti diadakannya UTS, UAS dan UAN.

Pada tahap pengembangan (*developing*) yang dilakukan oleh PKBM antara lain: melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu dengan masyarakat sekitar, pemerintah, perusahaan swasta, instansi lain yang berkaitan dengan Pendidikan Masyarakat; serta melakukan perluasan jangkauan program, pengelola melakukan perluasan informasi mengenai program-program yang ada di PKBM melalui pemasangan brosur-brosur penerimaan warga belajar baru baik itu

melalui media cetak maupun media sosial. Penjelasan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Nia Hoerniasih (2017:131) menjelaskan bahwa:

Pada tahap pengembangan (developing), untuk tetap mempertahankan keberlangsungan program, dimana pendidikan akan terus berkembang, maka pengelola harus tetap mengimplementasikan pendekatan manajemen Pendidikan NonFormal seefektif dan seefisien mungkin, karena tidak menutup kemungkinan bila salah satu dari pendekatan manajemen PNF tidak dijalankan maka dikhawatirkan akan mendapatkan kepincangan terhadap program yang sedang diselenggarakan

Pembahasan

Strength (Kekuatan), kekuatan penyelenggaraan PKBM yaitu: 1) PKBM menjawab kebutuhan masyarakat putus sekolah atau masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal. 2) penyelenggaraan PKBM berpijak atas dasar kebutuhan peserta didik. 3) Programnya disesuaikan dengan situasi, kondisi warga belajar. 4) Karakteristik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan memiliki sifat fleksibel, serta adanya 3 dimensi pembelajaran, usaha, dan pengembangan masyarakat memungkinkan beradaptasi dengan beragam kebutuhan, keunikan dan kepentingan. 5) Diakuinya dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai satuan penyelenggara pendidikan non formal. 6) Adanya anggaran pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. 7) Adanya Forum Pendidikan non formal baik bersifat Regional, Nasional maupun internasional yang saling mendukung untuk perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan PKBM. 8) PKBM dapat membuat beberapa layanan program masyarakat seperti : program PKH Perempuan, PAUD, Keaksaraan Fungsional, kesetaraan, Majelis Talim, Pemberdayaan Perempuan, Kewirausahaan Pemuda, dan lain-lain.

Weaknes (kelemahan), kelemahan penyelenggaraan PKBM antara lain: 1) Masih ada masyarakat, birokrasi pemerintah, stakeholder terkait yang belum mengenal dengan baik kiprah PKBM sebagai pendidikan pelengkap pendidikan formal. 2) Bermunculan stigma-stigma negatif tentang pendidikan nonformal pada lembaga-lembaga penyelenggaranya, misalnya PKBM yang menyelenggarakan program Paket A, B.C. Bahwa keberadaannya hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah saja namun dalam pelaksanaan dijalankan “asal-asalan” bahkan ada yang fiktif. 3) masih banyaknya stakeholder yang terlalu mengkredilisasikan pendidikan nonformal dan lebih mementingkan pendidikan formal yang berorientasi ijazah.

Opportunity (Peluang), peluang-peluang yang ada pada PKBM yaitu: 1) semakin carut marut pendidikan formal, maka pendidikan nonformal akan menjadi alternatif. 2) Keberadaan PKBM mampu menjangkau warga yang tidak terlayani pendidikan formal hingga pelosok nusantara. 3) Adanya tiga dimensi dalam penyelenggaraan program PKBM yaitu pembelajaran, usaha dan pengembangan masyarakat memungkinkan untuk menarik partisipasi masyarakat dan dukungan lembaga-lembaga donor yang lebih luas. 4) Adanya komitmen global dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) yang implementasinya di tingkat akar rumput sebagian besar merupakan ruang cakupan PNF. 5) Adanya komitmen global tentang *Education For All* dan *Lifelong Learning* yang sebagian besar merupakan ruang cakupan PNF. 6) berlakunya kebijakan tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang jumlah alokasi dananya cukup besar dan bersifat konsisten. 7) Mulai banyak bantuan-bantuan dari internasional untuk persoalan-persoalan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat. 8) Pendidikan

Non Formal diatur langsung dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang menjadi payung hukum kuat untuk menjalankannya.

Threat (Ancaman), ancaman-ancaman pada PKBM adalah: Adanya potensi konflik diantara berbagai lembaga yang bertanggungjawab membina dan mengembangkan program Pendidikan nonformal, misalnya antara Sub-Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten, SKB, BPKB, Sub Dinas Pendidikan Provinsi, BPPLSP, FK-PKBM Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang apabila tidak disikapi secara dewasa dapat menimbulkan usaha-usaha kontra produktif bagi gerakan untuk memajukan Program PNFI dan adanya beberapa oknum yang merasa terancam akan adanya gerakan-gerakan PNFI yang murni dan kuat sehingga membuat langkah-langkah perlawanan yang dapat menghambat gerak maju agar oknum-oknum tersebut tidak kehilangan 'keuntungan' dari 'manipulasi' dan KKN proyek PNFI.

KESIMPULAN

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PKBM kecenderungan baik karena pengelola sudah merancang dari awal program tersebut dengan baik hingga keluaran (*Output*) menghasilkan hasil yang memuaskan untuk para lulusan warga belajarnya bisa memiliki keahlian atau keterampilan serta pengetahuan untuk masa depan warga belajar tersebut baik itu warga belajar bisa membuka usaha sendiri maupun bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaidah, Siti. (2017). Analisis Efektivitas Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat. Semarang: Media Ekonomi Dan Manajemen. Vol. 32. No. 2 Juli 2017. P-ISSN. 0854-1442. E-ISSN. 2503-4464. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/541>
- Hardjono; Tri Joko Raharjo; & Tri Suminar. (2019). Model Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Berbasis Life Skills Dan Kewirausahaan. Semarang: UNNES Edukasi. Vol. 13. No. 2. P-ISSN 0852-0240. E-ISSN 2746-4016. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/view/955/892>
- Himayaturrohman, Emma. (2017). Strategi Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Provinsi Riau. Bali: Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjamin Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Vol. 3. No. 1. Hal. 100-110. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/96/103>
- Hoerniasih, Nia. (2017). Faktor Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Sejahtera" "Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Karawang: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA. 2017. ISBN 978-602-19411-2-6. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/125-134>
- PP PAUD dan DIKMAS KEMENDIKBUD. (2019). Jumlah Satuan Pendidikan PKBM Kabupaten Bandung Barat. Jakarta: Manajemen PAUD DIKMAS KEMENDIKBUD. <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/Rekap/PKBM-SatuanPendidikan?semesterId=20192&kodeWilayah=020000>
- Siswoyo, Hardi. dkk.. (2012). Pengelolaan Pembiayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Studi Situs PKBM Karya Bhakti Punung Pacitan). Solo: Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naskah Publikasi. http://eprints.ums.ac.id/20856/12/NASKAH_PUBLIKASI.PDF

42 *Prahestiwi, Hatimah & Saepudin.* Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

----- (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Wajib Belajar. Bandung: Citra Umbara. Cetakan I